



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DJOKO GUNAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **12845**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.362.551.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 459 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 433.318.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 40.530.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 51.480.000
4. Tanah Seluas 533 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 14.391.000
5. Tanah Seluas 1.430 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 38.610.000
6. Tanah Seluas 167 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 4.522.500
7. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 23.250.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/205 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 63.550.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 27.900.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/137 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/129 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	51.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
17.000.000		
2. LAINNYA, SEPEDA GIANT Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
10.000.000		
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI		
Rp. 24.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	667.788.875
D. SURAT BERHARGA	Rp.	38.839.427
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	301.782.038
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.421.961.840
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.421.961.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.